



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Faktor yang Menghambat Indonesia dalam Melakukan
Compliance terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP)
Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019**

Skripsi

Oleh

Ezra Permana Trisna

2016330008

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Faktor yang Menghambat Indonesia dalam Melakukan
Compliance terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP)
Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019**

Skripsi

Oleh

Ezra Permana Trisna

2016330008

Pembimbing

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

Bandung

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ezra Permana Trisna
Nomor Pokok : 2016330008
Judul : Faktor yang Menghambat Indonesia dalam Melakukan *Compliance* terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 8 Juni 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Giandi Kartasmita, S.IP., MA

: 

Sekretaris

Ratih Indraswari, S.IP., MA

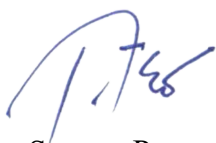
: 

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ezra Permana Trisna
NPM : 2016330008
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Faktor yang Menghambat Indonesia dalam Melakukan *Compliance* terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Mei 2020

Penulis,



Ezra Permana Trisna

ABSTRAK

Nama : Ezra Permana Trisna
NPM : 2016330008
Judul : Faktor yang Menghambat Indonesia dalam Melakukan *Compliance* terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019

ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) merupakan sebuah rencana strategis yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk mencapai integrasi pariwisata di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara yang telah mengadopsi ATSP memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan arahan strategis tersebut. Melalui Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Pariwisata tahun 2015-2019, pemerintah Indonesia memiliki target yang harus dicapai oleh para pelaku kegiatan pariwisata. Namun pada kenyataannya, tidak seluruh poin telah diimplementasi oleh pemerintah Indonesia. ASEAN juga tidak memiliki tindakan konkret dalam bentuk *enforcement* untuk menangani masalah tersebut. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata serta diplomasi ekonomi di ASEAN pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa pemerintah Indonesia tidak melakukan *compliance* secara utuh terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan* 1 dan 2 pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo tahun 2014-2019. Penelitian ini dibatasi oleh masa kepemimpinan presiden Joko Widodo tahun 2014 hingga 2019, periode berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Pariwisata tahun 2015-2019, serta definisi dari *compliance*. Berdasarkan teori *compliance* milik Carmela Lutmar dan Carnerio, ASEAN dapat dikategorikan sebagai organisasi regional yang memiliki *power* yang bersifat normatif dan tidak memaksa. Renstra Kementerian Pariwisata sebagai *masterplan* pariwisata di Indonesia seharusnya memiliki poin-poin yang diadaptasi dari ATSP yang bertujuan untuk mencapai integrasi pariwisata ASEAN tersebut. Namun pada kenyataannya, ASEAN tidak bisa memaksa setiap anggotanya untuk taat (*comply*) terhadap ATSP yang telah disusun dan disepakati. Sikap normatif ASEAN tersebut menjadi alasan mengapa Indonesia tidak taat secara utuh terhadap poin-poin ATSP. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki prioritas yang berbeda dengan ATSP, dimana pemerintah masih sangat domestik-sentris, dan cenderung mengabaikan tujuan utama dari ATSP yaitu integrasi pariwisata di Asia Tenggara, yang termasuk ke dalam kerangka integrasi ekonomi ASEAN. Kedua alasan inilah yang menjadi faktor penghambat yang membuat Indonesia tidak bisa memenuhi kewajiban *compliance* terhadap ATSP secara utuh.

Kata kunci: ATSP, ASEAN, pariwisata, integrasi ASEAN, integrasi ekonomi ASEAN, Indonesia, kerja sama, paksaan

ABSTRACT

Name : Ezra Permana Trisna

NPM : 2016330008

Title : *Factors that Inhibit Indonesia in Complying ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) During the Governance of Joko Widodo (2014-2019)*

ASEAN Tourism Strategic Plan is a masterplan established by the members of ASEAN that aim to achieve tourism integration in South East Asia. Indonesia as a member state that has adopted ATSP has an obligatory to implement the strategic directions. Through Indonesia's tourism strategic plan (Renstra) 2015-2019, the government had some targets as obligations to be achieved by the government itself and the stakeholders. In fact, many crucial points from ATSP were absent in Indonesia's tourism strategic plan (Renstra), and there was no concrete response coming from ASEAN in the form of enforcement to overcome the issue. Government's stance on developing tourism using economic diplomacy in ASEAN during president Joko Widodo's governance shows a big question regarding why did Indonesia not comply ASEAN Tourism Strategic Plan phase 1 and 2 entirely during president Joko Widodo's governance (2014-2019). This research is limited to the governance of president Joko Widodo from 2014 to 2019, the implementation of Indonesia's tourism strategic plan (Renstra) from 2015 to 2019, and the definition of term 'compliance'. According to Carmela Lutmar and Carnerio's compliance theory, ASEAN can be categorized as a regional organization that have a normative power and has no rights to force its members to comply towards ATSP. Indonesia's tourism strategic plan as a tourism masterplan in Indonesia should have implemented points adopted from ATSP that aim to achieve ASEAN integration. In fact, ASEAN cannot force its members to comply towards ATSP that have been arranged and agreed. The ASEAN's normativity becomes the main reason behind Indonesia's in compliance towards ATSP as a whole. Furthermore, Indonesia's Renstra's priority and ATSP's are different. The government's priority was very centered to domestic issues, meanwhile ATSP was not. These two reasons become the obstacles of Indonesia's absence in fulfilling the obligatory to comply ATSP entirely.

Keywords: ATSP, ASEAN, tourism, ASEAN integration, ASEAN economic integration, Indonesia, cooperation, enforcement

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena dengan rahmat dan kuasa-Nya penelitian berjudul “Faktor yang Menghambat Indonesia dalam Melakukan *Compliance* terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019” ini dapat selesai. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian yaitu mengetahui alasan mengapa Indonesia tidak melakukan *compliance* terhadap ATSP secara utuh pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo tahun 2014-2020.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat di dalam penulisan ini. Kepada bapak Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono Drs., M.A. selaku dosen yang telah membantu proses penulisan di dalam mata kuliah Rancangan Penelitian (Seminar), serta ibu Ratih Indraswari, S.IP., M.A. selaku dosen yang telah membimbing penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai baik dalam segi teknis, substantif, maupun dalam persiapan mental. Penulis percaya bahwa di dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki di masa mendatang Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sebagai masukan untuk melengkapi penelitian ini agar kelak mampu memberikan dampak positif di lingkup ilmu hubungan internasional.

Bandung, 12 Mei 2020

Ezra Permana Trisna

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus beserta semua orang yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini. Secara khusus, penulis ingin berterima kasih secara penuh terhadap orang-orang yang dari awal mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

-Orang-orang terdekat dengan penulis-

Mama Ina. Terima kasih mama untuk segala dukungan baik berupa doa, moral, kasih sayang, semangat, maupun finansial yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di jenjang kuliah ini hingga selesai dan berhasil menuntaskan skripsi sebagai tugas akhir.

Papa Hendri. Terima kasih untuk papa yang sudah memberikan segala dukungan berupa doa, moral, kasih sayang, motivasi, perlengkapan belajar, perlengkapan mengerjakan skripsi, pelajaran hidup, hingga segala hal yang berhubungan dengan keuangan. Karena papa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas sebagai syarat kelulusan. Terima kasih atas segala tuntunan papa selama ini.

Raras. Terima kasih untuk adik penulis satu-satunya yang mau mendukung penulis secara tulus baik di rumah Solo maupun di apartemen di Bandung. Terima kasih

untuk segala kekonyolan, kebaikan, semangat, dukungan, marah-marah dan segala sesuatunya selama penulis menyelesaikan studi di Hubungan Internasional Unpar.

-Orang-orang yang menjadi inspirasi di HI Unpar-

Mba Sylvi. Terima kasih penulis ucapkan kepada mba Sylvi selaku ketua program studi Ilmu Hubungan Internasional sejak penulis masuk Unpar sebagai mahasiswa baru di tahun 2016 hingga tahun 2019. Terima kasih atas nilai-nilai berharga yang telah diberikan baik pada masa perkuliahan, akademik, maupun bimbingan sewaktu penulis aktif sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (HMPSIHI).

Mba Ratih. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada mba Ratih selaku pembimbing skripsi penulis sekaligus ketua program studi Ilmu Hubungan Internasional pada masa penulis menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala nilai-nilai hidup dan semangat yang telah diberikan, juga atas bimbingan moral, mental, teknis, serta substantif dari awal penulisan skripsi hingga pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikannya.

Mas Giandi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada mas Giandi atas segala bimbingannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk pengetahuan mengenai ekonomi dan politik, serta saran-saran yang diberikan demi kebaikan penulisan skripsi ini.

Dosen-dosen HI Unpar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen Hubungan Internasional Unpar yang tidak bisa penulis tuliskan satu per satu. Terima kasih atas segala bimbingan semangat, moral, pengetahuan, dan akademik sehingga penulis dapat terus termotivasi untuk menyelesaikan skripsi dan studi ini

-Rekan-rekan seperjuangan-

Rekan-rekan Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Unpar. Terima kasih kepada Adit, Anto, Pradya, Yohanna, Monic, Gianni, Kirana, Michelle, Jovita, Kia, Faza, Edo, Subhan, Garry, Devia, Ko Albert, Ko Ivan, Ko Jeremy, dan rekan-rekan PSM lainnya atas segala suka-duka, dan perjuangan bersamanya dalam menempuh kuliah sekaligus berlatih untuk konser demi konser.

Rekan-rekan IREC Unpar. Terima kasih kepada Rifki, Rahma, Maria C., Kezia Gabrielle, Chelsea, Aldrich, Alanna, Elizabeth, Olivia, Thea, Ko Henmul, JA, Kak Khalif, dan rekan-rekan IREC lainnya, terima kasih atas segala pengalaman dari semester satu hingga penulis mengakhiri masa kepengurusan di IREC sebagai presiden, serta terima kasih atas dukungannya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

HMPSIHI Unpar. Terima kasih kepada rekan-rekan HMPSIHI Unpar yang telah menjadi saksi perjalanan penulis dari awal perkuliahan hingga pada akhirnya

penulis berhasil menyelesaikan skripsi melalui berbagai pengalaman, kepanitiaan, hingga rapat-rapatnya.

Ring 1 HMPSIHI 2018-2019. Terima kasih terkhusus untuk rekan-rekan *ring 1* HMPSIHI #WalktheTalk (Kenken, Beldom, Ferry, Kathleen, Stella Claresta, Kezia Liana, Cheryl, Cindy, Aufar, Nydia, Aretta, Jelny, Yudha, Rayvindra, dan Cahyadi) yang telah menjadi rekan seperjuangan mulai dari awal masa kepemimpinan hingga masa akhir kuliah.

Delegasi USA. Penulis ingin penulis ucapkan terima kasih kepada Richard, Kathleen, Kezia Gabrielle, Stella, Priscilia, Nabilla, Yudha, VK, Alanna, dan Naya yang mau berjuang bersama dalam Praktik Diplomasi (Prakdip) hingga akhirnya menyelesaikan tugas akhir ini secara bersama-sama. Persahabatan kita tidak akan sampai disini saja.

Protokol Gintre. Terima kasih kepada Andita, Kathleen, dan rekan-rekan Gintre lainnya yang telah membantu penulis dalam mengawali masa kepemimpinan sebagai *thirdman* sehingga penulis mendapatkan pengalaman yang tidak tergantikan selama menjadi panitia.

Delegasi JOINMUN. Terima kasih penulis ucapkan kepada delegasi *Jogjakarta International MUN*, terkhusus untuk Akmal yang telah menjadi rekan dalam simulasi G20, sehingga penulis dapat mendapatkan pengalaman praktik

berdiplomasi dan juga pengalaman yang luar biasa baik dalam persiapan maupun pelaksanaan MUN.

Kos IFF House. Terima kasih kepada bapak dan ibu Wawan selaku bapak dan ibu kos, Stella Stephanie, Velly, Jole, Ko Abed, Ko Gilbert, Ko Dodi, dan ko Levy yang telah menjadi saksi perjuangan sekaligus rekan dari semester satu hingga pada akhirnya penulis berhasil mencapai akhir perjuangan dalam studi di kampus Unpar.

Teman-teman Lengser Team. Terima kasih Kenken, Cindy, yang sudah menjadi saudara, mentor, sekaligus sahabat bagi penulis kapanpun dan dimanapun sehingga penulis bisa menjadi pribadi yang berempati, penuh rasa syukur, sekaligus menjalankan segala pekerjaan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Terima kasih untuk segala waktunya dalam berbincang, bercanda tawa, hingga jalan-jalan dan menjadi motivator bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada Robby, Vivi, Anet, Adel, Akmal, Joe yang telah menyumbangkan segala ide, pikiran, dan candaan yang membuat hidup penulis selama di perkuliahan lebih berwarna. Terima kasih atas segala kritik dan masukan terhadap penulis sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Terima kasih kepada Zizi, Felix, Bobby yang telah menjadi rekan-rekan yang mau mendukung penulis dalam hal non-akademik sehingga kehidupan penulis selama di

perkuliahan tidak hanya mengenai substansi, melainkan juga seni, bermusik, dan lain sebagainya.

Terima kasih untuk Jordan Ibrahim, Nabil, Felix, Nicholas Adit, Ivan sebagai anggota band “Ini Dia” yang telah mewarnai kehidupan penulis sejak PMKT tahun 2018 sehingga penulis dapat mengekspresikan segala bentuk emosi, ide, dan kreativitas ke dalam musik band.

Joe William, Ignas, Gisela, Miftahul, Halimah, Michelle Patricia, Andita, Alifa, Marcelin, dan Akmal yang sudah menjadi teladan, sahabat, sekaligus motivator bagi penulis dalam menjalani segala sesuatu baik di akademik maupun bukan, hingga pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk *quality time*-nya di restoran Volcano dan *Q-meals*.

Untuk Moudy, Alifah, Aretta, Epe, Kak Ferdin, dan semua teman-teman yang berjuang bersama selama bimbingan bersama mba Ratih, terima kasih atas motivasi dan bantuan dari kalian semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah terlibat di dalam perjalanan hidup penulis semasa kuliah dan semasa penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Berkat kalian semua, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dan penelitian ini sebagai syarat kelulusan.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.2.1. Pembatasan Masalah	12
1.2.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	14
1.4 Kerangka Pemikiran.....	15
1.4.1 Kajian Literatur	15
1.4.2 Kerangka Pemikiran.....	23
1.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
1.5.1 Metode Penelitian.....	32
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	33
1.6 Sistematika Pembahasan	33

BAB II IMPLEMENTASI ASEAN *TOURISM STRATEGIC PLAN* (ATSP) DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA DI INDONESIA..... 36

- 2.1 ASEAN *Tourism Strategic Plan* Sebagai Sarana ASEAN untuk Meningkatkan Perekonomian Setiap Negara Anggota 39
 - 2.1.1 ASEAN *Tourism Strategic Plan* Sebagai Sarana untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia 44
- 2.2 Potensi Pariwisata Indonesia Sebagai Salah Satu Komponen Produk Domestik Bruto (PDB) Terbesar..... 47
- 2.3 Target capaian wisatawan dan pemasukan dari potensi pariwisata secara keseluruhan di Indonesia..... 51
- 2.4 Kebijakan Pariwisata di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2019) dalam Sudut Pandang Teori *Domestic Compliance* dan Diplomasi Ekonomi di ASEAN dalam Kerangka *Economic Integration* 54
- 2.5 Perbandingan Arah ATSP 2011-2015 dan 2016-2025 dengan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Renstra Kemenpar RI) 2015-2019 62

BAB III PENGARUH PRINSIP NORMATIF DAN *RECIPROCAL* ASEAN TERHADAP *COMPLIANCE* YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA 71

- 1.4.2 Perbandingan Poin *Compliance* Indonesia Terhadap ATSP Tahap I dengan ATSP tahap II tahun 2016-2019 78
 - 3.1.1 Tujuan ASEAN *Tourism Forum* dan Implementasinya dalam ATSP 2011-2015 dan 2016-2025 79
 - 3.1.2 Perbandingan Poin *Compliance* Indonesia terhadap ATSP 1 dan 2 Tahun 2016-2019 82
- 3.2 Pelaksanaan ATSP di 9 Negara Anggota ASEAN Selain Indonesia (Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Laos)..... 96
- 3.3 *Normative Power* ASEAN Bagi Indonesia Sebagai Alasan Ketidakpatuhan Indonesia untuk Melakukan *Compliance* terhadap ATSP Secara Utuh 105

BAB IV KESIMPULAN..... 112

DAFTAR PUSTAKA 116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia.....	11
Tabel 2.1 Perbandingan Poin <i>Strategic Directions</i> ATSP Terhadap Renstra...	64
Tabel 3.1 Arahan Strategis 1 ATSP 2011-2015.....	83
Tabel 3.2 Arahan Strategis 2 ATSP 2011-2015.....	84
Tabel 3.3 Arahan Strategis 3 ATSP 2011-2015.....	86
Tabel 3.4 Perbandingan <i>Compliance</i> Indonesia terhadap ATSP 1 & 2.....	91
Tabel 3.5 Peringkat Regulasi Negara Anggota ASEAN di Dunia.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Kunjungan Wisatawan ke ASEAN.....	43
Gambar 2.2 Diagram komponen PDB.....	48
Gambar 2.3 Tahapan Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian.....	49
Gambar 2.4 Grafik Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia 2009-2018.....	53
Gambar 2.5 Rencana Strategis Kementerian Pariwisata RI.....,	62
Gambar 3.1 Arah-an-arah-an Strategis ATSP 2016-2020.....	88

DAFTAR SINGKATAN

AEC	: <i>ASEAN Economic Community</i>
AEI	: <i>ASEAN Economic Integration</i>
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
ATA	: <i>ASEAN Tourism Agreement</i>
ATF	: <i>ASEAN Tourism Forum</i>
ATSP	: <i>ASEAN Tourism Strategic Plan</i>
CATC	: <i>Common ASEAN Tourism Curriculum</i>
EU	: <i>European Union</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MRA-TP	: <i>Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional</i>
NTO	: <i>National Tourism Organisation</i>
PAD	: <i>Pendapatan Asli Daerah</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
Renstra	: Rencana Strategis
RITS	: <i>Roadmap for Integration Tourism Sector</i>
TPCB	: <i>Tourism Professional Certification Board</i>
UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UNWTO	: <i>United Nations World Tourism Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor yang menjadi penopang perekonomian hampir semua negara di Asia Tenggara sejak tahun 2000. Semenjak dokumen UNWTO *Tourism Report* mengeluarkan pernyataan mengenai banyaknya peninggalan dan warisan dunia di Asia Tenggara, banyak negara di Asia Tenggara yang mulai merestorasi bangunan-bangunan bersejarah di negara masing-masing, dengan tujuan untuk mengembalikan kembali (restorasi) dan memunculkan potensi pariwisata domestik. Kesadaran inilah yang secara perlahan-lahan mulai dibangun oleh pemerintah-pemerintah negara yang tergabung didalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Semenjak didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, lima negara penggagas (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) mulai menginisiasi bentuk kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan.¹ ASEAN menjadi poros regionalisme baru di benua Asia, dimana kesadaran akan kerjasama regional di Asia Tenggara mulai terbangun dan terjalin. Pada 24 Februari 1976 di Bali, Indonesia, telah ditandatangani deklarasi ASEAN *Concord* oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, kerajaan Thailand, Malaysia, dan Filipina yang menyatakan bahwa seluruh anggota organisasi regional tersebut harus bekerja sama dalam perdagangan dalam rangka mempromosikan

¹ Ponciano Intal, *ASEAN and Member States: Transformation and Integration*, volume 3, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia), 5-6, http://www.eria.org/ASEAN_50_Vol_3_Complete_Book.pdf

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.² Dengan ditandatanganinya dokumen deklarasi tersebut, maka tumbuhlah era baru di ASEAN yang membahas mengenai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada munculnya inovasi-inovasi baru dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan pembangunan di dalam negara-negara anggota.

Keikutsertaan Brunei Darussalam (8 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos (23 Juli 1997), Myanmar (23 Juli 1997), dan Kamboja (30 April 1999) menambah banyaknya potensi wisata yang tergabung didalam ASEAN.³ Bergabungnya negara-negara tersebut ke menjadikan anggota ASEAN bertambah menjadi 10 dan menambah dinamika baru bagi kawasan tersebut. Berkembangnya organisasi regional di Asia Tenggara tersebut memperkuat kekuatan ekonomi dan identitas di kawasan Asia Tenggara. Kondisi negara-negara anggota pada awal berdirinya ASEAN pada tahun 1967 mendorong terjalannya inisiatif untuk melakukan integrasi antar-negara yang tertuang pada visi dari organisasi regional tersebut yaitu “... untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan budaya di dalam kawasan melalui usaha keras bersama dalam semangat persamaan dan kerjasama dalam rangka untuk memperkuat fondasi demi kemakmuran dan perdamaian komunitas negara-negara Asia Tenggara.”⁴ Tentu dengan bertambahnya negara-negara anggota ASEAN, maka

² ASEAN, *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, https://asean.org/?static_post=agreement-on-the-common-effective-preferential-tariff-scheme-for-the-asean-free-trade-area-afta, Diakses 15 Oktober 2019.

³ Sekretariat ASEAN, *About ASEAN*, <http://setnas-asean.id/tentang-asean>, Diakses 16 Oktober 2019.

⁴ ASEAN, *A Journey towards regional economic integration 1967-2017*, Diakses 16 Oktober 2019, <https://asean.org/storage/2017/09/ASEAN-50-Final.pdf>.

cakupan integrasi yang terjalin akan semakin luas, namun sekaligus kompleks. Organisasi yang memiliki 10 negara anggota tersebut harus menghimpun segala latar belakang baik politik, budaya, maupun ekonomi dan memberikan wadah yang berfungsi untuk mengemban kepentingan nasional masing-masing negara.

Setelah adanya *ASEAN Trade Agreement on Free Trade Area* pada 28 Januari 1992 yang dilakukan Singapura, keinginan dan bantuan antar-negara anggota semakin meningkat untuk bisa melewati krisis yang ada. Pengawasan dari organisasi regional tersebut membuat usaha perdagangan bebas menjadi selangkah lebih maju di Asia Tenggara. Neraca perdagangan ASEAN pada telah mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 1967 hingga 2015, membuat ASEAN tersebut berhasil menjadi organisasi regional yang paling berhasil di ASEAN.⁸ Peningkatan PDB negara-negara di regional tersebut dari tahun 1990 hingga 2000 sebesar 1,5% juga membuat organisasi tersebut berhasil menaikkan taraf ekonomi regional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.⁹ Kemudian, pada pertemuan ASEAN ke-7 (*ASEAN 7th Summit*), disepakatilah sebuah perjanjian yaitu *ASEAN Tourism Agreement (ATA)* pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja.¹¹ ATA menjadi acuan bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk melakukan standarisasi dan pengawasan terhadap situasi arus pariwisata yang ada di dalam negara tersebut.

⁸ Ponciano Intal, *ASEAN and Member States: Transformation and Integration*, volume 3, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia), 16-17,

http://www.eria.org/ASEAN_50_Vol_3_Complete_Book.pdf

⁹ *Ibid.*, 18.

¹¹ ASEAN, *ASEAN Tourism Agreement*, Diakses 20 Oktober 2019,

https://asean.org/?static_post=asean-tourism-agreement.

Setelah diinisiasinya ATA, pemerintah negara-negara di ASEAN mulai membentuk *Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* (MRA-TP) pada tahun 2009, dan kemudian mulai diadopsi pada tahun 2012 yang didasari pada *ASEAN Framework Arrangement on MRAs* tahun 1998 demi mencapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.¹³ Berkembangnya industri pariwisata pasca tahun 2000 membuat banyaknya kesepakatan yang harus dibuat, mengingat banyak sekali investasi yang masuk beserta dengan tenaga kerja. MRA sendiri memiliki fungsi dan tujuan untuk memfasilitasi mobilisasi pekerja di kawasan Asia Tenggara dalam perdagangan bebas yang berlaku di ASEAN. Kemudian, MRA-TP memberikan rincian mengenai kualifikasi sertifikasi pariwisata untuk para tenaga kerja pariwisata profesional yang akan bekerja di negara tujuan, dan harus menerima pendidikan dengan kurikulum pariwisata ASEAN (*Common ASEAN Tourism Curriculum* (CATC)) dan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh *Tourism Professional Certification Board* (TPCB).¹⁴ Hal ini diperlukan sebagai penegasan akan identitas masyarakat ASEAN dalam meningkatkan taraf perekonomian melalui pariwisata. Indonesia sebagai salah satu anggota pertama ASEAN memiliki keuntungan dengan adanya jalinan kerja sama intra ASEAN dengan 10 negara anggota melalui *Mutual Recognition Agreement on Tourism Professionals* (MRA-TP). Dengan adanya kerja sama inilah pemerintah mendapat keunggulan dalam investasi dan perdagangan.

¹³ Dokumen ASEAN. *Handbook ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism*, Diakses 18 Oktober 2019, https://www.asean.org/storage/images/2013/economic/handbook%20mra%20tourism_opt.pdf.

¹⁴ *Ibid.*, 1.

Urgensi pariwisata yang semakin meningkat di kawasan Asia Tenggara menciptakan sebuah kondisi dimana kawasan tersebut membutuhkan perencanaan pariwisata yang matang untuk mencapai integrasi di ASEAN. Maka dari itu, dibentuklah ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) dan disetujui oleh pertemuan ASEAN *National Tourism Organisations* (NTOs) sebagai kelanjutan dari *Roadmap for Integration of Tourism Sector (RITS)*.¹⁵ ATSP diinisiasi pada forum *Special Working Group on ASEAN Tourism Integration* ke-9 di Phnom Penh, Kamboja tahun 2009 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2011 sebagai hasil riil hasil dari forum pariwisata ASEAN.¹⁶ 10 negara di Asia Tenggara mempunyai kewajiban untuk saling mengimplementasikan kurikulum pendidikan ASEAN dan mempromosikan pariwisata di ASEAN serta negara masing-masing berdasarkan standar yang ditetapkan. Penetapan standar ini bertujuan supaya tidak ada penyimpangan standar pariwisata dan *gap* yang terlalu besar diantara negara-negara anggota ASEAN. Terlebih lagi, negara-negara ASEAN memiliki banyak kemiripan kultur dan topografi yang dapat dijadikan destinasi pariwisata. Persamaan identitas dan pentingnya integrasi menjadikan pentingnya implementasi ATSP di dalam agenda pariwisata setiap negara anggota ASEAN. Maka dari itu, pemerintah negara-negara ASEAN harus memiliki visi peningkatan pembangunan ekonomi secara nyata dari hasil ATSP yang telah disepakati bersama.¹⁷

¹⁵ ASEAN, *ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professional*, Diakses 20 Oktober 2019,

https://www.asean.org/storage/images/2013/economic/handbook%20mra%20tourism_opt.pdf.

¹⁶ Haiyyu Darman Moenir, "Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 dalam Kebijakan Pariwisata Indonesia di Masa Pemerintahan Jokowi", *Andalas Journal of International Studies*, vol. 6 (Mei 2017): 57-59

¹⁷ *Ibid.*, 60.

Demi tercapainya integrasi ekonomi dan salah satu visi dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yaitu ASEAN sebagai tujuan / destinasi wisata tunggal, maka seluruh negara anggota organisasi tersebut wajib untuk melakukan berdasarkan potensi pariwisata dan regulasi masing-masing negara.¹⁹ ATSP dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Apabila tahap pertama menekankan pada penyelenggaraan pariwisata regional dan kompetitif demi mencapai tujuan ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal, maka tahap kedua berfokus kepada peningkatan ekonomi dan penerimaan PDB negara dengan target sebesar 15% dari 12% pada tahun 2025.²⁰ ATSP kedua juga memiliki jangka waktu yang relatif lebih lama yaitu 10 tahun (2016-2025) dengan harapan implementasi ATSP-II dapat berjalan lebih efektif daripada yang pertama. Setelah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, ATSP-II memiliki urgensi yang lebih tinggi dengan target diversitas produk pariwisata yang menjangkau semua elemen dari seluruh negara di Asia Tenggara, sehingga akan mendorong peningkatan ekonomi secara masif dan menaikkan daya bersaing..²¹

Indonesia juga turut menjadi negara yang berkewajiban untuk mengimplementasikan ATSP di dalam kawasan Asia Tenggara karena telah resmi mengadopsi rencana strategis tersebut pada tanggal 17 Januari 2011. Indonesia memiliki kewajiban sama halnya dengan negara lain di ASEAN untuk melakukan strategi pariwisata tersebut karena telah berkomitmen untuk menandatangani dan

¹⁹ Dokumen ASEAN, *ASEAN Tourism Crisis Communications Manual*, Diakses 25 Oktober, 2019. https://www.asean.org/storage/2016/01/publications/ASEAN_Tourism_Crisis_Communications-2015.pdf.

²⁰ *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025*. Manila, Filipina: the Philippine Department of Tourism as Lead Coordinator for the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025 (2015).

²¹ *Ibid.*

mengadopsi ATSP. Indonesia menjadi subjek yang sangat menarik dan penting di ASEAN mengingat posisinya sebagai negara pendiri, negara dengan populasi paling banyak di ASEAN, serta negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara.²⁴ Indonesia memiliki keleluasaan yang sangat besar bahkan cenderung terlalu besar untuk bisa mempromosikan negara tersebut ke dunia internasional, serta memiliki penerimaan *Foreign Direct Investments* (FDIs) dan jumlah kunjungan turis yang sangat besar (US\$19,2 juta dan 7,7 juta).²⁵

Pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo, semua instruksi mengenai pengembangan pariwisata tertuang di dalam nawa cita dengan target mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.²⁶ Hal tersebut sebenarnya sudah diimplementasikan sebelum adanya ATSP I (2011-2015). Dengan dilaksanakannya ATSP II (2016-2025), maka pemerintah memiliki kewajiban untuk benar-benar serius dalam mentaati dan menjalankan strategi pariwisata yang tertuang dalam *ASEAN Tourism Strategic Plan* 2016-2025 dan diadopsi dalam Rencana Strategis (Renstra) pariwisata pemerintah.

²⁴ *Indonesia Brief*, Diaksesdiakses pada 26 Oktober 2019, <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-member-states/view/709/newsid/793/indonesia.html>.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat*, Diakses 26 Oktober 2019, <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>.

1.2 Identifikasi Masalah

Indonesia sebagai negara anggota ASEAN telah menyepakati, dan menandatangani rencana strategis yang telah disusun bersama sembilan anggota lainnya dalam forum Integrasi ASEAN ke-9 di Phnom Penh, dan mengadopsinya pada tanggal 17 Januari 2011. Sesuai dengan kewajiban Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN dan juga negara yang berperan besar dalam perumusan ATSP, seharusnya Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata RI 2015-2019 (Renstra Pengembangan Pariwisata Kemenpar RI 2015-2019) sejalan dengan ATSP yang telah disepakati dan ditandatangani. Hal ini menunjukkan terdapat sebuah celah atau anomali yang terjadi di Indonesia dan ASEAN. Indonesia yang seharusnya mengikuti dan mentaati seluruh arahan strategis dari ATSP, namun justru yang terjadi sebaliknya. Indonesia hanya mentaati sebagian dari poin ATSP, tanpa mengimplementasikan tujuan besar dari rencana strategis itu sendiri, yaitu integrasi pariwisata di ASEAN. Padahal, ATSP disusun dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Namun, menurut jurnal penelitian Haiyyu Darman Moenir yang diterbitkan oleh Universitas Andalas, pemerintah Indonesia justru menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap ATSP yang telah disepakati.³¹ Kemudian, menurut sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Vetty Alfiarnika dari Universitas Gadjah Mada yang dilakukan pada tahun 2017 berjudul “Tingkat Compliance Indonesia terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan I* (ATSP

³¹ Haiyyu Darman Moenir, “Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 dalam Kebijakan Pariwisata Indonesia di Masa Pemerintahan Jokowi”, *Andalas Journal of International Studies* Vol. 6 (Mei 2017): 59-60.

I)”, Renstra Kemenpar RI hanya mengacu dan melanjutkan kerangka pariwisata yang telah disusun oleh pemerintah RI sejak tahun 2007, dan justru tidak memperhatikan poin-poin dari ATSP baik tahap I maupun II.³²

Yang kedua, Indonesia telah memiliki strategi promosi pariwisata yang berjudul “*Visit Indonesia*” yang diluncurkan pada tahun 2007 akhir dan telah mengalami kenaikan kunjungan turis mancanegara sebesar 15,68% di tahun 2008.³³ Maka dari itu, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terlebih dahulu dan memiliki pengalaman dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata untuk memajukan perekonomian domestik. Selain itu, Indonesia memiliki potensi pariwisata paling besar di antara negara-negara anggota ASEAN, dimana terbentang pulau-pulau dengan penduduk sebanyak 255 juta jiwa, dan dengan berbagai latar belakang budaya, suku, dan adat.³⁴ Relevansi dari *ASEAN Tourism Strategic Plan* tahap pertama menjadi kurang berarti mengingat dengan kondisi dan segala pengalaman yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam hal inovasi, promosi, dan pembukaan wilayah sebagai destinasi wisata domestik bagi wisatawan mancanegara. Pemakaian ATSP sebagai acuan utama dalam pembuatan kebijakan pariwisata menjadi sangat minimal dan

³² Vetty Alfiarnika, “Tingkat Compliance Indonesia Terhadap Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan I (ATSP 1),” (2017): 23–25.

³³ Detik Finance, *Visit Indonesia 2008, Jumlah Turis Naik 15,68%*, Diakses 30 Oktober 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-933022/visit-indonesia-2008-jumlah-turis-naik-1568>

³⁴ Indonesia Investments, *Culture of Indonesia*, Diakses 30 Oktober 2019, <https://www.indonesia-investments.com/culture/item8>.

pemerintah cenderung berintensi untuk membuat kebijakan atas pertimbangan domestik.³⁵

ATSP seharusnya memberikan dampak signifikan dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan apabila merujuk pada target ATSP, mengingat bahwa pariwisata menyumbang 10% PDB dalam perekonomian Indonesia.³⁶ Namun, justru terjadi sebuah ketimpangan dimana pada tahun 2012 hingga 2015, terjadi penurunan PDB yang signifikan. *ASEAN Tourism Strategic Plan* seharusnya memberikan gambaran bentuk kerjasama yang konkret dan standarisasi sistem pariwisata, promosi, dan perjalanan sehingga meningkatkan taraf ekonomi Indonesia melalui indikator penerimaan PDB. Masalah kedua ini memiliki korelasi dengan masalah pertama, dimana Indonesia seharusnya terikat dengan ATSP sebagaimana mestinya telah disepakati di dalam *ASEAN Tourism Forum* di Hanoi, Vietnam, dan forum integrasi ASEAN di Phnom Penh. Namun, keterkaitan Indonesia dalam implementasi ATSP tentunya tidak akan maksimal mengingat banyaknya strategi yang telah dibuat oleh pemerintah diluar ATSP.

³⁵ Vetty Alfiarnika, "Tingkat Compliance Indonesia Terhadap Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan I (ATSP 1)" (2017): 25.

³⁶ Bank Dunia, *Profil Indonesia*, Diakses 30 oktober 2019, <https://data.worldbank.org/country/indonesia>.

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PDB (Miliar USD)	755.0	893.0	918.0	915.0	891.0	861.0
PDB (Perubahan % tahunan)	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9
PDB perkapita (Dalam USD)	3,167	3,688	3,741	3,528	3,442	3,329

Sumber: Bank Dunia³⁷

Data di atas dapat dikaitkan dengan sektor pariwisata mengingat kontribusi sektor pariwisata terhadap ekspor barang dan jasa meningkat drastis dari 10% di tahun 2005 menjadi 17% di tahun 2012, namun dengan tingkat GDP yang cenderung menurun. Tren tersebut menjadi tantangan bagi terselenggaranya ATSP tahap kedua yaitu tahun 2016 hingga 2025.³⁸ ATSP menjadi tolok ukur bagi keterikatan suatu negara (dalam hal ini Indonesia) terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Implementasi dari ATSP harus diiringi dengan sistem birokrasi baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dari tahun 2015 hingga 2019, namun

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Indonesia Investments, *Produk Domestik Bruto Indonesia*, Diakses 30 Oktober 2019, <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253>.

hal tersebut bukan semata-mata melalui forum dan *strategic plan* milik ASEAN, melainkan melalui *branding* “*Wonderful Indonesia*” yang telah dilakukan selama hampir 12 tahun berturut-turut mulai dari “*Visit Indonesia 2007*”. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2019 perekonomian Indonesia telah tumbuh sebesar 5,1%³⁹ dan hal ini terjadi karena adanya dorongan integrasi pariwisata di ASEAN, mengingat identitas ASEAN sebagai kawasan yang memiliki 11 dari 17 warisan dunia versi UNESCO mendorong para wisatawan untuk datang ke negara-negara di kawasan tersebut termasuk ke Indonesia.⁴⁰ Meski Indonesia selama proses ATSP 2011-2015 tidak berkontribusi banyak dalam implementasi kebijakan pariwisata dalam negeri, namun dalam ATSP 2016-2025 Indonesia tetap mempertahankan ATSP sebagai acuan mengingat akan pentingnya integrasi dalam kawasan ASEAN.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh waktu, dokumen, serta definisi dari ketaatan (*compliance*). Pembatasan waktu terdiri dari tahun dimulainya hingga berakhirnya periode kepemimpinan presiden Joko Widodo pada dari tahun 2014 hingga 2019. Selain itu, waktu dari penelitian ini juga dibatasi oleh tahun berjalannya Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Renstra Pengembangan Destinasi dan Pariwisata Kemenpar

³⁹ Badan Pusat Statistik, *Ekonomi Indonesia 2018 Tumbuh 5,17 Persen*, Diakses pada 30 Oktober 2019, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-5-17-persen.html>.

⁴⁰ ASEAN, *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025*. (Manila, Filipina: the Philippine Department of Tourism as Lead Coordinator for the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025, 2015), 4.

RI) pada tahun 2015 hingga 2019. Pembatasan masalah ini diambil karena Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimulai pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo pada tahun 2015, dan ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) memegang peranan penting dalam terlaksananya integrasi ekonomi di Asia Tenggara melalui MEA.

Kemudian, penelitian ini dibatasi oleh dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian dan Ekonomi Kreatif saja beserta dengan implementasi dan tindakan operasionalnya. Dokumen Renstra tersebut berfungsi sebagai fokus dan indikator utama dari pelaksanaan ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP). Keseriusan pemerintah dalam mengadopsi ATSP diukur dari tertuang atau tidaknya poin-poin ATSP ke dalam rencana strategis yang ada di Indonesia, dan kemudian akan dianalisa melalui pelaksanaan dari rencana strategis tersebut dalam bentuk kegiatan, maupun dokumen lain berupa undang-undang untuk mendeterminasi apakah ATSP dijalankan dengan baik atau tidak, dan faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi ATSP di dalam Renstra.

Selain dalam bentuk waktu dan dokumen, penelitian ini juga dibatasi oleh definisi dari *compliance* itu sendiri. Menurut Jana von Stein, *compliance* didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana perilaku negara sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh suatu perjanjian.⁴² Definisi von Stein ini menjelaskan fokus penelitian yang meliputi ketidakpatuhan Indonesia karena tidak

⁴² Jana von Stein, *The Engines of Compliance In Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 2.

mencerminkan perilaku negara yang telah sesuai dengan yang sudah ditentukan di dalam perjanjian. Definisi ini akan dikembangkan lebih lanjut oleh Carmela Lutmar dan Carnerio.

1.2.2 Perumusan Masalah

Mengapa pemerintah Indonesia tidak melakukan *compliance* secara utuh terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan* 1 dan 2 pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo tahun 2014-2019?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengapa Indonesia sebagai salah satu anggota sekaligus pendiri ASEAN tidak melakukan *compliance* (pemenuhan) terhadap kesepakatan untuk melakukan strategi yang berbasis ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) dari tahun 2014-2019 secara utuh. Penelitian ini juga akan melibatkan indikator dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebagai pemasukan dari sektor pariwisata.⁴⁷

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siapa saja yang membaca dan bermaksud untuk meneliti dan melakukan riset mengenai *compliance* (pemenuhan)

⁴⁷ *Ibid.*

Indonesia terhadap implementasi dari *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025* serta berguna bagi masyarakat yang ingin tahu seberapa signifikan implementasi dari ATSP 2016-2025 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kajian Literatur

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sebuah jurnal yang berjudul “*Indonesia in ASEAN: Regional Leadership between Ambition and Ambiguity*” yang ditulis oleh Felix Heiduk dari Jerman. Jurnal ini membahas mengenai mengenai posisi Indonesia di ASEAN, Indonesia di dalam ASEAN *Economic Community (AEC)*, perjanjian regional, integrasi ekonomi ASEAN, dan yang paling penting adalah permasalahan *Mutual Recognition Arrangements (MRA-TP)*. Jurnal ini membahas mengenai posisi Indonesia yang seharusnya mengikuti MRAs dan salah satunya adalah MRA-TP yang telah disepakati dalam tingkat ASEAN, apalagi posisi Indonesia di ASEAN adalah salah satu *leader country* dari sektor pariwisata. Namun yang terjadi justru ada ambiguitas dalam pengambilan kebijakan luar negeri dan kebijakan pariwisata di Indonesia. Posisi Indonesia yang sangat terfokus oleh kebijakan domestik dan mekanisme *domestic compliance* membuat MRAs menjadi kurang begitu berarti. Jurnal ini membahas secara lengkap tentang fakta dan data mengenai Indonesia dan integrasi ekonomi di

ASEAN. Penulis menggunakan jurnal ini untuk membahas mengenai sub-bab integrasi ekonomi di bab 2.⁴⁸

Kemudian, jurnal yang penulis pakai dalam mendukung penelitian ini adalah jurnal berjudul “Implementasi ASEAN *Tourism Strategic Plan* 2011-2015 dalam Kebijakan Pariwisata Indonesia di Masa Pemerintahan Jokowi” yang ditulis oleh Haiyyu Darman Moenir. Jurnal tersebut banyak membahas mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ASEAN *Tourism Strategic Plan* 2011-2015 pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Jurnal tersebut memuat banyak data kuantitatif yang mendukung penelitian ini, terutama tabel percepatan investasi di bidang pariwisata dan skema ASEAN *Community Development*. Selain itu, jurnal tersebut juga memaparkan bahwa Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya *comply* terhadap ATSP, juga didorong oleh karena ASEAN dan ATSP itu sendiri. Haiyyu Darman Moenir menjelaskan mengenai peningkatan hubungan kerja sama eksternal intra-ASEAN dengan Indonesia dalam konteks maksimalisasi 10 destinasi wisata prioritas di Indonesia dalam kerangka pariwisata bertajuk “*Wonderful Indonesia*”. Hal ini menjadi alasan dan latar belakang penelitian dari berbagai kebijakan pariwisata Indonesia yang cukup mandiri untuk mengembangkan pariwisata tanpa adanya campur tangan dari ASEAN.⁴⁹ Peneliti akan menggunakan literatur ini untuk menjelaskan mengenai evaluasi dari ATSP dan masalah yang dihadapi selama

⁴⁸ Felix Heiduk, “Indonesia in ASEAN: Regional Leadership Between Ambition and Ambiguity”, *SWP Research Journal*, vol. 6 (April, 2016).

⁴⁹ Haiyyu Darman Moenir, “Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 dalam Kebijakan Pariwisata Indonesia di Masa Pemerintahan Jokowi”, *Andalas Journal of International Studies*, vol. 6 (Mei 2017)

rencana strategis tersebut yang berlangsung pada tahun 2011 hingga 2015 pada bab 2.

Jurnal ketiga yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjudul “Efektivitas ASEAN *Tourism Strategic Plan* 2011-2015 di Indonesia” yang ditulis oleh Lady Amalia D.A.P. dari Universitas Airlangga. Menjelang tahun 2000, negara-negara anggota ASEAN mulai memiliki inisiatif untuk membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan disahkannya dokumen “Bali Concord II” yang menandai dimulainya persiapan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN. Untuk mendukung rencana tersebut, negara-negara anggota ASEAN berusaha untuk mempromosikan pariwisata sebagai sarana untuk menunjang perekonomian dengan membentuk ASEAN *Tourism Forum* (ATF) yang pada akhirnya membentuk kesepakatan berupa ASEAN *Tourism Strategic Plan* untuk meningkatkan perekonomian, saling mempromosikan ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal, dan mendukung tercapainya integrasi ekonomi di ASEAN. Jurnal ini menjelaskan secara lengkap dan rinci mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam setiap arahan strategis (*strategic directions*) yang ada pada ATSP 2011-2015. Jurnal ini membantu penulis dalam penulisan bab 3 untuk menjelaskan mengenai masalah-masalah yang membuat Indonesia belum bisa melaksanakan *compliance* terhadap ATSP dengan baik.⁵⁰

⁵⁰ Lady Amalia. “Efektivitas ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 Di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 5 (Februari 2016). <https://pdfs.semanticscholar.org/f54a/fa78fce26b1a15fd2d34d68fe262d67a554c.pdf>.

Kemudian, selain jurnal penulis juga menggunakan arahan dari buku “*an Introduction to Tourism*” karya Leonard J. Lickorish dan Carson L. Jenkins. Buku ini memberikan banyak pandangan dan sejarah mengenai perkembangan dari pariwisata di seluruh dunia. Meskipun tidak membahas mengenai ASEAN, namun ada banyak referensi mengenai penggunaan indikator PDB negara dalam mengukur kemajuan pariwisata berdasarkan persentase dari PDB yang bersangkutan. Buku ini menerangkan berbagai perspektif melalui pariwisata dan bagaimana tiap kebijakan pemerintah bisa meningkatkan daya saing di bidang pariwisata dalam suatu negara dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dari banyak hal. Peneliti juga menyadari bahwa pentingnya pengetahuan akan pariwisata dapat mengembangkan daya pikir untuk bisa melakukan inovasi bagi dunia pariwisata dan ekonomi dan membantu kebijakan pemerintah dalam mengatur maupun membuat regulasi yang penting bagi masuk dan keluarnya turis ke dalam maupun ke luar suatu negara. Buku ini akan sangat membantu penelitian dalam hal kerangka berpikir bahwa meskipun kesepakatan regional belum ditepati, setiap negara masih bisa secara mandiri mengembangkan pariwisata dan tetap menjalin hubungan antar-negara dalam sebuah kawasan. Penulis akan menggunakan buku ini pada bab 2 untuk menjelaskan mengenai pariwisata dan pentingnya bagi perekonomian di Indonesia.⁵¹

Penulis juga menggunakan literatur yang berupa dokumen yang dikeluarkan oleh ASEAN yaitu “*ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015.*” Dokumen ini

⁵¹ Leonard J. Lickorish, “an Introduction to Tourism”, *British Library Cataloguing in Publication Data* (1997).

berisi tentang poin-poin dan strategi yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN untuk diimplementasikan ke dalam kebijakan pariwisata masing-masing negara sebagai indikator kemajuan pariwisata di Asia Tenggara melalui promosi dan inovasi. Literatur ini membahas mengenai keseluruhan tata cara dan data yang diperlukan oleh pemerintah negara-negara di ASEAN untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengawasi jalannya kebijakan pariwisata yang didasarkan pada ATSP sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dari *ASEAN Tourism Forum*. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh ASEAN ini juga membahas mengenai integrasi di ASEAN serta bekerja sama dengan badan ASEAN (*ASEAN Bodies*) yang lain sehingga bisa terjalin kerjasama yang integratif, efektif, dan maksimal. Dokumen ini merinci mengenai 6 prinsip ATSP, *guidelines*, proses, serta metodologi dari pelaksanaan. Data dan lini masa yang disediakan di dalam dokumen ATSP berfungsi untuk memaksimalkan pencapaian objektif dalam pelaksanaan oleh pemerintah. Tentunya juga disertai oleh efektivitas dari penyelenggaraan *strategic plan* ini. ATSP tahap pertama ini merupakan literatur acuan yang paling utama untuk dibahas dan dijadikan acuan dalam penelitian ini beserta dengan ATSP tahap kedua, karena berbagai poin yang menjadi rujukan bagi setiap negara di ASEAN untuk diimplementasikan di dalam setiap kebijakan pariwisatanya. ATSP tahap pertama akan digunakan oleh penulis di bab 2 dan bab 3 untuk menjelaskan perbandingan terhadap Rencana strategis (Renstra) pemerintah Indonesia.⁵²

⁵² ASEAN, *ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015*, Diakses 10 November 2019, https://asean.org/?static_post=asean-tourism-strategic-plan-2011-2015-2.

Kemudian, literatur berikutnya yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebuah dokumen yang juga dikeluarkan secara resmi oleh ASEAN yaitu “*ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025*.” Dokumen ini menjadi kelanjutan dan pelengkap dari ATSP 2011-2015 yang juga digunakan sebagai referensi penelitian. Dokumen ini berisi dan membahas mengenai target-target yang belum tercapai di dalam pelaksanaan dari ATSP 2011-2015, serta berbagai capaian dari ATSP sebelumnya yang dapat digunakan sebagai acuan bagi negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi yang berdasarkan ATSP 2016-2025. Literatur ini mengulas secara lengkap mengenai *strategic directions* bagi pelaksanaan ATSP tahap kedua. Dijelaskan pula dalam dokumen ini mengenai perbandingan indikator tahap satu dan tahap dua, dimana sasaran dari ATSP 2016-2025 ini masih berkaitan dengan inovasi, investasi, pertumbuhan ekonomi regional, namun juga banyak mengulas mengenai masalah keamanan perjalanan, kebijakan *visa-free*, hingga pengaruh *climate change* atau perubahan cuaca terhadap kondisi pariwisata dan perjalanan dari luar regional ke dalam ASEAN. Dokumen ini juga menjelaskan mengenai kenaikan PDB regional ASEAN hingga mencapai target yaitu 15%, sehingga ATSP tahap kedua ini menjadi literatur yang sangat penting dalam penelitian ini untuk melengkapi ATSP tahap pertama dalam kebijakan pariwisata presiden Joko Widodo. Penulis akan menggunakan literatur ATSP 2 sebagai sumber utama selain ATSP 1 pada bab 2 dan bab 3.⁵³

⁵³ ASEAN, *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025*. (Manila, Filipina: the Philippine Department of Tourism as Lead Coordinator for the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025, 2015).

Literatur non-jurnal keempat yang akan digunakan sebagai referensi penelitian adalah jurnal yang dikeluarkan oleh lembaga *think-tank* Asia Pasifik KPMG yang berjudul “*ASEAN Business Guide: The Economies of ASEAN and the Opportunities they present*”. Jurnal ini membahas keseluruhan mengenai banyaknya peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi baik pekerjaan, bisnis, maupun investasi di ASEAN. Seturut dengan pernyataan UNWTO bahwa 11 dari 17 potensi pariwisata warisan dunia ada di ASEAN, maka akan ada banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di negara-negara anggota ASEAN. Dalam mengimplementasikan ATSP, Jurnal ini juga membahas mengenai kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh para investor lengkap data *country facts* dari negara-negara di ASEAN. Penyediaan peluang usaha ini juga disertai dengan pertumbuhan PDB yang konkret dan kredibel dari setiap negara serta investor-investor FDI terbesar di kawasan tersebut, dengan kerja sama (*partnership*) yang telah banyak dilakukan. Tentunya penulis juga mengapresiasi data yang sangat lengkap tersebut, mengingat para investor menyumbang modal dan berkontribusi besar dalam pertumbuhan dan perkembangan pariwisata yang membantu menaikkan perekonomian domestik dan regional di kawasan Asia Tenggara. Jurnal ini menjadi salah satu jurnal yang sangat penting dalam penulisan penelitian ini untuk memberikan data dan informasi mengenai kekuatan yang dimiliki oleh setiap negara anggota ASEAN dalam menggerakkan ekonomi, terutama dalam hal ini adalah berkaitan dengan kebijakan dan diplomasi ekonomi presiden Joko Widodo.

Jurnal ini akan membantu penulis dalam menjelaskan diplomasi ekonomi presiden Joko Widodo pada bab 2.⁵⁴

Selanjutnya, penulis menggunakan referensi dari dokumen *report* yang dikeluarkan oleh ASEAN yaitu “*ASEAN Integration Report*”. Saat ini integrasi di antara anggota ASEAN masih menjadi agenda utama di setiap forum baik Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN maupun *ASEAN Tourism Forum* (ATF). Di dokumen ATSP telah dijelaskan bahwa integrasi sangat diperlukan dalam mencapai ASEAN sebagai destinasi tunggal. Maka dari itu, urgensi dari *ASEAN Economic Integration Report* yang merupakan sub-bab dari dokumen ini sangatlah penting, mengingat meskipun integrasi di antara negara anggota ASEAN telah tercapai, namun integrasi belum terjadi sepenuhnya. Masih ada berbagai hambatan baik dalam melakukan perdagangan maupun dalam melakukan kerja sama. Persamaan komoditas, serta latar belakang (meskipun tidak semuanya) membuat pentingnya melakukan integrasi dalam hal ekonomi bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di dalam negara-negara di ASEAN dalam rangka mengiring Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penulis akan menggunakan bagian integrasi ekonomi dalam kerangka integrasi ASEAN untuk mengembangkan analisa mengenai efektivitas dari sistem normatif ASEAN yang tidak memiliki perangkat *enforcement* untuk memaksa setiap anggotanya untuk mengimplementasikan ATSP. Laporan ini akan penulis gunakan untuk

⁵⁴ Honson To. *ASEAN Business Guide: The Economies of ASEAN and the Opportunities they present*, (2018).

menjelaskan bab 3 mengenai tingkat dukungan negara anggota ASEAN terhadap integrasi di ASEAN, sesuai dengan tujuan besar dari ATSP.⁵⁵

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Dalam perjanjian atau kesepakatan internasional, negara menjadi aktor yang sangat penting dalam melakukan kepatuhan (*compliance*) terhadap kesepakatan tersebut. Jana von Stein (seorang akademisi hubungan internasional) mendefinisikan *compliance* sebagai tingkat sejauh mana perilaku negara sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh suatu perjanjian.⁵⁷ Hal inilah yang menjadi perdebatan di antara akademisi modern yang mempertanyakan mengenai tingkat dan kemampuan suatu negara untuk taat (*comply*) terhadap perjanjian yang bersangkutan. Menurut von Stein, efektivitas sebuah organisasi juga tergantung dari ketaatan sebuah anggota baik negara maupun individual terhadap unsur-unsur yang telah disepakati di dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, kepatuhan (*compliance*) negara itulah yang membentuk organisasi internasional. Menurut Amitai Etzioni (1975,1995) sebagai salah satu pencetus teori *compliance*, sebuah organisasi bisa diklasifikasikan berdasarkan kekuatan yang mereka miliki⁵⁸.

Klasifikasi kekuatan sebuah organisasi menurut Etzioni dibagi menjadi tiga, yaitu: *coercive power*, *utilitarian power*, dan *normative power*. Keterlibatan sebuah negara didalam mentaati sebuah aturan, norma, dan kesepakatan yang telah dibuat

⁵⁵ Jayan Menont, Laurence Todd, dan Darmashakthini Arujunan, *ASEAN Integration Report*, (ASEAN Secretariat, 2015).

⁵⁷ Jana von Stein, *The Engines of Compliance In Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 2.

⁵⁸ Fred C. Lunenberg, "Compliance Theory and Effectiveness and Organization," *International journal of scholarly academic intellectual diversity* Vol. 14 (2012): 4.

Bersama di dalam sebuah organisasi tentu saja tidak bisa dilepaskan dari seberapa mengikatnya sebuah organisasi tersebut terhadap anggota-anggotanya.⁵⁹ *Compliance* juga disebutkan oleh Karns, Mingst, dan Stiles melalui buku berjudul “*International Organizations*” sebagai acuan apakah perjanjian internasional itu efektif atau tidak.⁶¹ Dalam hal ini, negara merupakan aktor utama di dalam tatanan global (*global governance*). Maka dari itu, Karns, Mingst, dan Stiles menyebutkan bahwa diperlukan sebuah organisasi internasional dengan *rule supervision* yang dapat memantau segala bentuk *compliance* dari setiap negara anggota organisasi internasional tersebut melalui instrumen aturan, paksaan (*enforcement measures*), dan menyelesaikan perselisihan antar negara (*adjudicating disputes*).⁶² Namun di dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa negara yang lebih lemah akan cenderung mengalami konsekuensi berupa tidak cukupnya sumber daya lokal, para ahli, hingga kapasitas pemerintah untuk bisa melakukan *compliance*.⁶³

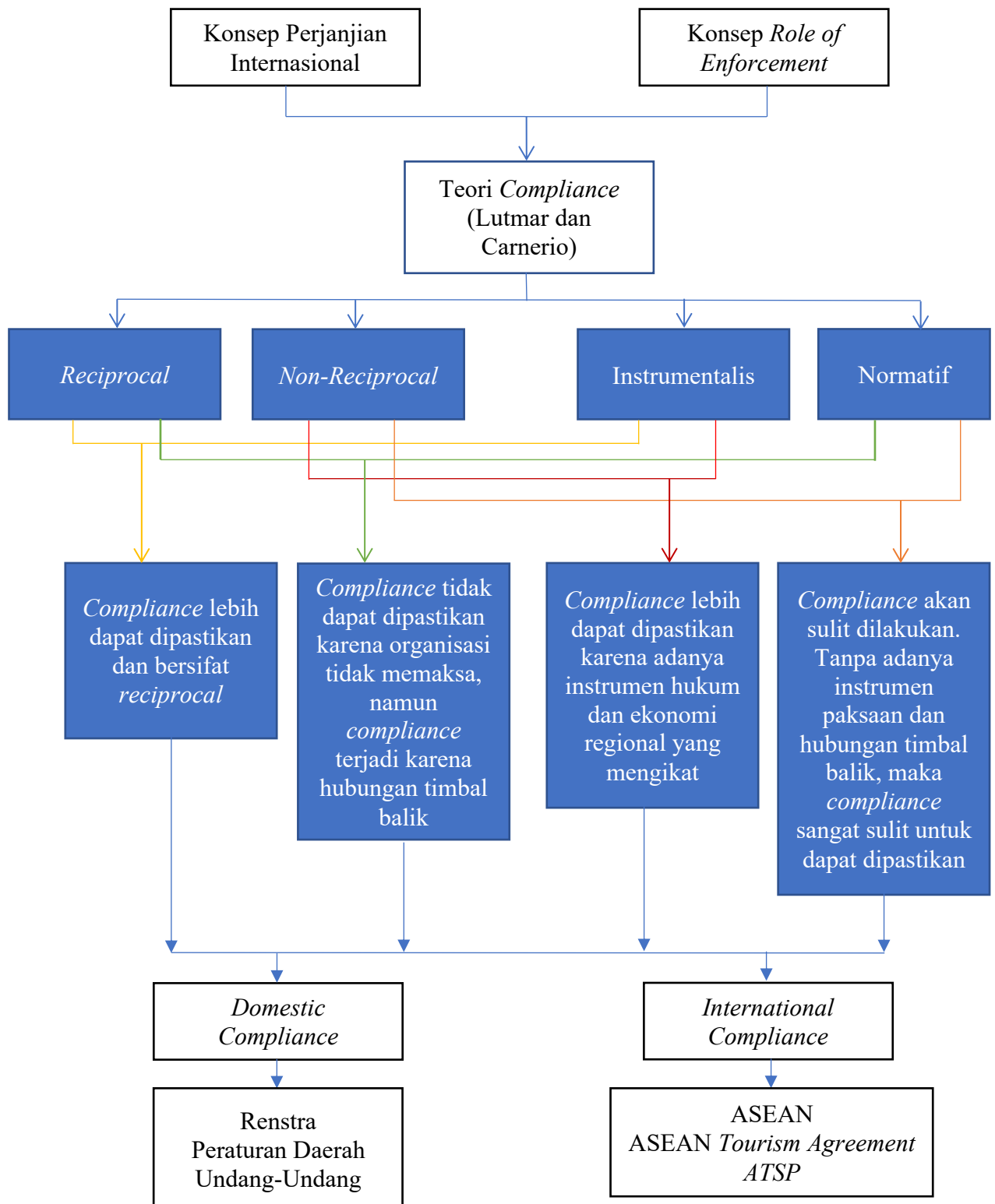
⁵⁹ *Ibid.*, 4.

⁶¹ Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles, *International Organizations Third Edition* (USA: Lynne Rienner, 2015), 8.

⁶² *Ibid.*, 27.

⁶³ *Ibid.*, 29.


Skema Teori *Compliance* Sebagai Teori Operasional dan Konsep *International Agreements* oleh Lutmar dan Carnerio



Lutmar dan Carnerio sendiri memberikan penjelasan bahwa *compliance mechanism* merupakan strategi yang dikerahkan oleh negara-negara untuk mempengaruhi sejauh mana negara anggota menyesuaikan perilaku mereka dengan isi perjanjian internasional.⁶⁴ Penulis mengacu pada teori *compliance* yang dicetuskan oleh Carmela Lutmar dan Cristiane L. Carnerio yang memiliki konsep dan pandangan bahwa *role of enforcement* menjadi aspek penting bagi sebuah organisasi regional supaya negara-negara anggotanya dapat taat (*comply*) terhadap peraturan yang berlaku.⁶⁵ Selain itu, Lutmar dan Carnerio menekankan bahwa *compliance* merupakan fenomena yang melibatkan banyak negara yang didorong oleh adanya sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama oleh seluruh negara anggota organisasi regional yang bersangkutan. Lutmar dan Carnerio membagi tipe *compliance* menjadi:⁶⁶

1. *Reciprocal*
2. *Non-reciprocal*
3. Instrumentalis
4. Normatif

Dari bagan yang ada di atas, dapat dijelaskan bahwa:



- a.  : Panah berwarna kuning menunjukkan hubungan antara tipe *reciprocal compliance* (timbang balik) dengan instrumental. Negara yang menerapkan tipe *compliance* ini akan lebih disiplin dalam melakukan ketaatan terhadap perjanjian

⁶⁴ Carmela Lutmar, Cristiane L. Carneiro, dan Sara McLaughlin Mitchell. *Formal Commitments and States' Interests: Compliance in International Relations*, (London: 2016), 5.

⁶⁵ *Ibid.*, 5.

⁶⁶ *Ibid.*, 6.

internasional. Namun sulit sekali untuk bisa mencapai pada tahap ini, karena kebanyakan organisasi internasional yang menerapkan instrumen yang bersifat koersif cenderung tidak melakukan *compliance* karena hubungan timbal balik antar negara.⁶⁷ Hal ini merujuk pada latar belakang berdirinya sebuah organisasi internasional, apakah karena faktor kebutuhan akan regionalisme, kesamaan sejarah, kesamaan komoditas, dan lain sebagainya.⁶⁸


- b.  : Panah berwarna hijau menunjukkan hubungan antara tipe *reciprocal compliance* (hubungan timbal balik) dengan aturan normatif yang terdapat dalam suatu organisasi internasional. Negara yang termasuk ke dalam organisasi internasional supremasi hukum regionalnya bersifat normatif, maka tidak akan ada ikatan yang dapat memastikan bahwa negara tersebut akan melakukan *compliance*. Namun, dengan adanya hubungan timbal balik yang mendorong terjadinya kerja sama regional, maka hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi negara tersebut untuk melakukan *compliance*.⁶⁹
- c.  : Panah berwarna merah menunjukkan hubungan antara negara yang menjalankan *compliance* dengan mekanisme *non-reciprocal* dengan instrument-instrumen yang memberikan paksaan (koersi) bagi negara untuk mematuhi aturan. Dengan adanya hubungan tersebut, persentase negara untuk *comply* terhadap perjanjian yang telah disepakati akan lebih besar. Hal ini disebabkan karena adanya

⁶⁷ Anne-Marie Slaughter, Andrew S. Tulumello, dan Stepan Wood, "International Law and International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary Scholarship", *The American Journal of International Law* 92, no. 3 (1998): 367.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Luke Nottage, Justin Malbon, Jeannie Paterson, and Caron Beaton-Wells, "Theoretical Perspectives on ASEAN and Consumer Law Developments", *Journal of Integration through Law: The Role of Law and the Rule of Law in ASEAN Integration* (2019): 121.

role of enforcement yang mendorong tiap negara untuk bisa *comply* terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati. Dengan tidak adanya latar belakang hubungan timbal balik (*reciprocity*), maka *enforcement* merupakan instrument yang cocok untuk bisa mengakomodasi setiap negara.⁷⁰

- d.  : Panah berwarna oranye menjelaskan alur yang paling tidak efektif dikarenakan tidak ada hubungan timbal balik antar negara serta instrumen yang mengatur mengenai kesepakatan yang berlaku. Dalam hal ini, suatu kerja sama maupun kesepakatan bisa dipastikan sulit untuk berhasil. Organisasi Internasional yang berada pada posisi ini tidak memiliki kekuatan secara riil, dan hanya memiliki kekuatan normatif yang tidak bisa menjamin setiap anggotanya untuk melakukan *compliance*. Diperparah dengan tidak adanya latar belakang resiprositas antar negara yang menambah esensi dari perjanjian yang telah dibuat. Artinya, *compliance* domestik dan internasional akan saling berkesinambungan.⁷¹

Kemudian, Lutmar dan Carnerio juga menjelaskan bahwa skema akan berujung pada *domestic* dan *international compliance*. Sistem *domestic compliance* didasarkan pada rezim pemerintahan yang berlaku. Lutmar dan Carnerio menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban bahwa negara memiliki otoritas yang mengatur setiap individu maupun instansi untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Indonesia memiliki instrumen yang dapat memastikan setiap instansi untuk patuh terhadap rencana strategis pemerintah pusat yang telah

⁷⁰ Carmela Lutmar, Cristiane L. Carneiro, dan Sara McLaughlin Mitchell. *Formal Commitments and States' Interests: Compliance in International Relations*, (London: 2016), 4.

⁷¹ *Ineffective International Agreement*, Diakses 20 Maret 2020, <http://encyclopedia.uia.org/en/problem/145284>.

dibuat. Negara yang menjalankan tipe *domestic compliance* akan lebih berorientasi pada aturan domestik yang telah dibuat, dan lebih terikat terhadap aturan domestik tersebut.⁷² Pernyataan Lutmar dan Carnerio tersebut didukung oleh George Lumbania dimana ia mengatakan bahwa teori *domestic compliance* dan *international compliance* pada dasarnya identik, hanya saja *domestic compliance* mengacu pada perilaku ketaatan dari individu dan instansi di dalam suatu negara saja.⁷³

Apabila *domestic compliance* dijelaskan sebagai mekanisme yang melibatkan individu dan instansi di dalam suatu negara, George Lumbania menjelaskan bahwa *international compliance* didasarkan pada perilaku negara terutama dalam melakukan ketaatan (*compliance*) terhadap perjanjian dan hukum internasional yang berlaku.⁷⁴ Lumbania mengkategorikan *international compliance* menjadi dua jenis yaitu rasionalis (berfokus pada paksaan dan hukuman bagi negara dalam menjalankan *compliance*), dan normatif (berfokus pada kerja sama dan pengawasan dalam menjalankan *compliance*).⁷⁵ Dalam menjalankan *international compliance*, umumnya negara memiliki kewajiban untuk taat terhadap aturan yang telah disepakati bersama sebagai sebuah perjanjian dalam ruang lingkup organisasi internasional maupun regional. *International compliance* dari suatu negara juga menjadi indikator keberhasilan dan ke-efektif-an dari organisasi internasional yang menaungi negara dalam perjanjian yang telah disepakati secara kolektif.

⁷² Lutmar, Carneiro & McLaughlin Mitchell, *Op.Cit.*, 4.

⁷³ George Lumbania, "Compliance Theory", *Making Law Work: Environmental Compliance & Sustainable Development* (2015): 53

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, 54.

Teori Economic and Regional Integration dan Konsep *Economic Arrangement* oleh Eduard Marinov

Teori pelengkap *compliance theory* oleh Lutmar dan Carnerio yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena kerja sama dan integrasi dalam kawasan tersebut adalah ‘teori integrasi ekonomi’ atau ‘*economic integration theory*’ oleh Eduard Marinov. Teori ini membahas lengkap mengenai situasi masalah yang dimiliki oleh tiap negara. Apabila dilihat dari perspektif pariwisata, maka setiap negara pasti mempunyai masalah domestik yang dihadapi. Maka dari itu, teori integrasi ekonomi ini mendorong terjalannya integrasi di dalam regional ASEAN. Regionalisme secara modern sudah tidak bisa diartikan lagi ke dalam aktivitas ekonomi klasik, melainkan menurut Eduard Marinov, teori ini juga bisa dikatakan sebagai *dynamic analysis of economic arrangements*.⁷⁶ Tentu saja integrasi ekonomi dalam ASEAN akan mendukung agenda ekonomi-politik yang ada di dalam organisasi regional tersebut, dan sejalan dengan tujuan dari ATSP, yaitu “menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang terintegrasi secara ekonomi dan menjadi kawasan wisata tunggal”.⁷⁷ *Economic arrangements* akan bisa secara maksimal apabila setiap negara berhasil menjalankan prinsip-prinsip ATSP sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁶ Eduard Marinov, *Economic Integration Theories and Developing Countries*, (South-east Europe: Infusing Research and Knowledge, 2014), 43. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/63310/>

⁷⁷ ASEAN, *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025*. (Manila, Filipina: the Philippine Department of Tourism as Lead Coordinator for the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025, 2015).

⁷⁸ *Ibid.*, 7.

1. *Integrated and structured tourism development*
2. *Sustainable and responsible development*
3. *Wide-ranging stakeholder collaboration*
4. *Quality tourism of products*
5. *Service excellence*
6. *Distinctive and interactive experience*

Teori-teori di atas diperkuat oleh konsep *mutual cooperation*, dimana di dalam melakukan suatu hubungan kerjasama menurut liberalisme ekonomi, dibutuhkan sebuah *mutual cooperation* dan harus ada prinsip timbal balik.⁷⁹ Tujuan dari diadakannya Asean Tourism Strategic Plan merupakan keberlanjutan dari *Roadmap for Integration of Tourism Sector (RITS)* di tahun 2005 yang berakhir pada tahun 2010. Untuk mengimbangi tingkat kompetisi dari negara-negara di Asia Tenggara, dibutuhkan kerjasama dalam sebuah forum. ASEAN memiliki bentuk forum ini yang bernama '*ASEAN Tourism Forum*' (ATF). Kerja sama yang diadakan melalui ATSP 2016-2025 bersifat timbal balik, dimana tidak ada negara yang lebih diuntungkan maupun lebih dirugikan dari adanya kerjasama ini. Sesuai dengan teori yang telah disebutkan di atas mengenai integrasi ekonomi dan fungsionalisme, ASEAN merupakan sebuah wadah untuk saling bekerja sama dan memecahkan masalah menggunakan solusi diplomasi regional. Inisiatif kerja sama pariwisata melalui ATSP mempunyai tujuan untuk meningkatkan standar ekonomi

⁷⁹ Stephen J. Majeski, and Shane Fricks, "Conflict and Cooperation in International Relations", *The Journal of Conflict Resolution* 39, no. 4 (1995): 622-45.

yang ada di dalam sebuah negara di ASEAN. Maka dari itu, sudah selayaknya apabila seluruh negara mentaati (*comply*) terhadap kewajiban berdasarkan perjanjian dan strategi yang telah dibuat.

1.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Menurut Gay (2006: 399) penelitian kualitatif merupakan pengumpulan, analisis, dan interpretasi narasi secara komprehensif pada data visual untuk mendapatkan wawasan terhadap fenomena tertentu yang menarik.⁸⁰ Penelitian dengan metode kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan strategi studi kasus yang dijelaskan oleh Meriam, yaitu partikularistik (studi fokus difokuskan pada keadaan tertentu), deskriptif (semua hasil akhir dari sebuah studi kasus dideskripsikan secara “kaya” dari sebuah fenomena, dan heuristik (studi kasus memberikan penjelasan kepada pembaca untuk memahami tentang fenomena).⁸¹ Data yang dikumpulkan berupa angka dan analisa yang telah diolah baik dari dokumen pemerintah, lembaga non pemerintah, perusahaan, maupun lembaga *think tank*. Metode penelitian ini akan didukung oleh data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, dan dokumen resmi pemerintah serta ASEAN.

⁸⁰ Universitas Pendidikan Indonesia, *Metodologi Penelitian*, diakses pada 9 Juni 2020, http://repository.upi.edu/9160/4/t_ips_0909614_chapter3.pdf

⁸¹ *Ibid.*, 71.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen dan literatur. Menurut Creswell, Gay, dan Mills, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam metode penelitian kualitatif yaitu mengidentifikasi topik penelitian, meninjau literatur, memilih peserta / obyek, pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan data, serta pelaporan dan mengevaluasi penelitian.⁸² Menurut Creswell, teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menggali dokumen dan literatur dan kemudian menginterpretasikan berdasarkan teori yang digunakan di dalam penelitian.⁸³ Teknik pengumpulan data ini sangat efektif dalam segi waktu dan ketepatan analisa, mengingat pemerintah Indonesia telah menekankan ASEAN di berbagai aspek baik pendidikan maupun data. Badan Pusat Statistik juga mempunyai sangat banyak sumber data yang berguna untuk memperkuat analisis dan argument untuk mencapai kesimpulan yang maksimal.

1.6 Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Bab I berisi mengenai penjelasan latar belakang, pembahasan masalah, konsep, dan teori. Pada bab ini, penulis menjelaskan bagaimana penelitisn ini dilakukan dan bagaimana data akan diperoleh. Bab I juga membahas mengenai rumusan masalah yang akan dijawab pada bab analisa. Selain itu, pada bab ini juga

⁸² *Ibid.*, 71.

⁸³ Carrie Williams, "Research Methods", *Journal of Business and Economic Research* vol. 5 (Maret 2007).

terdapat kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab II : Posisi Kebijakan Pariwisata Indonesia Terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP)

Pada bab ini, penulis menjelaskan posisi Indonesia pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo yang mengedepankan diplomasi ekonomi di ASEAN. Bab II juga menjelaskan mengenai adanya Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh pemerintah bersama dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) beserta perbedaan poin-poin yang terdapat pada Renstra dengan ATSP. Perbedaan tersebut yang akan menjadi data utama dalam analisa mengenai faktor yang menghambat Indonesia dalam melakukan *compliance* pada bab III. Dalam bab II dijelaskan bahwa Indonesia berhasil dalam melakukan *domestic compliance*.

Bab III: Pengaruh Prinsip Normatif dan Reciprocal ASEAN terhadap Compliance yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

Bab III berisi mengenai analisa mengenai ASEAN yang memiliki *normative power* yang tidak bisa memaksa setiap anggotanya untuk melakukan *compliance* terhadap ATSP. Pada bab III, penulis menjelaskan mengenai Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya yang tidak serta merta mau melakukan *compliance* terhadap ATSP, padahal di awal pembentukannya, sepuluh negara anggota ASEAN sudah sepakat untuk mengimplementasikannya termasuk Indonesia. Pembahasan tersebut berlanjut ke seberapa jauh peran ASEAN dalam

memastikan diimplementasikannya ATSP ke dalam rencana strategis di masing-masing negara, meskipun pada akhirnya ASEAN hanya memiliki *normative power* dan tidak memiliki *enforcement power*. Selain itu, bab ini menjelaskan bahwa hubungan timbal balik (*reciprocal*) sangat berpengaruh pada keberlanjutan kerja sama antar negara anggota ASEAN.

Bab IV: Kesimpulan

Bab IV berisi tentang kesimpulan mengenai faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Indonesia dalam melakukan *compliance* terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan*.

